

**DETEKSI *FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENTS* DENGAN
*HEXAGON FRAUD THEORY***

(Studi pada Perusahaan Sektor BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) Tahun 2017-2021)



MANUSKRIP

Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Semarang

Disusun Oleh

JULIA RACHMA HANDAYANI

NIM. E2B019074

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

2023

**DETEKSI FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENTS DENGAN
HEXAGON FRAUD THEORY**

**(Studi pada Perusahaan Sektor BUMN yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021)**

Julia Rachma Handayani

(E2B019074)

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Semarang

Email : juliarachma269@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini untuk mengetahui secara empiris pengaruh stabilitas keuangan, pergantian beberapa direksi, e-procurement, whistleblowing system, kepemilikan pemerintah, dan Sering Jumlah gambar CEO pada laporan keuangan penipuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah perusahaan BUMN tahun 2017–2021 yang terdaftar di BEI yaitu sebanyak 105 perusahaan. Menggunakan sebuah teknik purposive sampling, 22 perusahaan yang diteliti. Metode analitis dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda yang diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS26. Hasilnya menunjukkan bahwa *financial stability*, *director change*, *e-procurement*, dan *frequent number of CEO's picture* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sebaliknya *whistleblowing system*, dan *government ownership* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Kata Kunci: *Fraudulent Financial Statement*, *F-Score*, *State Owned Enterprises*, *Hexagon Fraud*

***DETECTION FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENTS WITH
HEXAGON FRAUD THEORY***

***(Studi on State Owned Enterprise Listed on Indonesia Stock Exchange (IDX)
2017-2021)***

Julia Rachma Handayani

(E2B019074)

Accounting Study Program, Muhammadiyah University of Semarang

Email : juliarachma269@gmail.com

ABSTRACT

The goal to be achieved from the results of this study is to empirically determine the effect of financial stability, replacement of several directors, e-procurement, whistleblowing systems, government ownership, and frequent number of CEO images on fraudulent financial reports. This study uses a quantitative approach. The population of this study is the 2017–2021 state-owned companies listed on the IDX, namely 105 companies. Using a purposive sampling technique, 22 companies were studied. The analytical method in this study is Multiple Linear Regression Analysis which is processed using the SPSS26 application. The results show that financial stability, director change, e-procurement, and the frequent number of CEO's pictures have an effect on fraudulent financial statements. In contrast, the whistleblowing system and government ownership have no effect on fraudulent financial reporting.

Keyword: *Fraudulent Financial Statement, F-Score, State Owned Enterprises, Hexagon Fraud*

1. Pendahuluan

Fluktuasi pasar yang terjadi di Indonesia akibat pandemi *Covid 19* di beberapa tahun terakhir telah menyebabkan banyak sektor mengalami ketidakstabilan siklus ekonomi dikarenakan lambatnya perputaran operasi keuangan dalam jangka panjang. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya bisa bertahan di kisaran positif pada kuartal pertama, berbeda dengan kuartal kedua yang menurun saat pemerintah Indonesia memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di banyak wilayah Indonesia (kemenkeu.go.id).

Pendapatan negara mengalami pertumbuhan negatif di -1,1% hingga 0,2% jauh di bawah pertumbuhan awal perkiraan 5,3%. Kondisi ini menafsirkan bahwa adanya tekanan yang tinggi pada sektor ekonomi dalam hal permintaan maupun penawaran. Demikian juga dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia mengalami deflasi atau menurun sebesar -2,07%. Salah satu dampak dari Covid 19 pada sektor ekonomi adalah persaingan bisnis di industri digital.

Berlakunya pembatasan fisik dan sosial dalam kurun waktu yang lama menyebabkan banyak perusahaan beralih fokus pada pengembangan bisnis digital agar perusahaan dapat terus bertahan untuk mendapatkan profitabilitas dalam keterbatasan ekonomi. Persaingan yang ketat, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menimbulkan tindak kejahatan keuangan, termasuk kecurangan laporan keuangan. Indikator utama untuk mengevaluasi kinerja perusahaan serta menjadi media komunikasi bagi para pemangku kepentingan dari internal maupun eksternal

adalah laporan keuangan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berusaha memberikan informasi keuangan yang baik sehingga kinerja perusahaan terlihat positif dan layak untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan. (Agustina & Pratomo, 2019). Kecurangan laporan keuangan penting untuk diketahui karena dampak dari kejahatan keuangan tersebut mengakibatkan kerugian negara, badan usaha dan pihak pemangku kepentingan. Penipuan dilakukan dengan sengaja dan sadar bahwa laporan keuangan yang dihasilkan tidak mengikuti standar akuntansi yang berlaku dan hanya ditunjukkan untuk pihak yang membutuhkan.

Sebanyak 70% kecurangan di Indonesia adalah korupsi yang melibatkan penyajian laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan merupakan perilaku melanggar hukum dan sangat merugikan berbagai macam pihak. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia tahun 2020 melaporkan bahwa Indonesia berada diperingkat 85 dari 180 negara dan berdasarkan hasil survei, diasumsikan terjadi penyimpangan anggaran sebesar 2%. Sementara itu, temuan survei ACFE 2019 mengungkapkan tingkat kecurangan keuangan sebesar 6,7% yang merugikan Rp 2.260.000.000 atau 9,2%. Ini menunjukkan bagaimana pelaporan keuangan palsu lebih lazim setiap tahunnya. Kecurangan yang terjadi di Indonesia tercermin dari kasus korupsi, penyalahgunaan barang negara/properti, serta kepemilikan bisnis (ACFE Indonesia, 2020).

ACFE Indonesia (2020) mengatakan bahwa pemerintah merupakan organisasi/lembaga yang paling dirugikan oleh kecurangan yaitu sebesar 8,5%. Diurutan kedua adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 31.8 miliar, diikuti oleh perusahaan swasta 15,1% dan lembaga non profit 2,9% dan instansi lain terkait sebesar 1,7% (Achmad dkk, 2022). Berdasarkan laporan ACFE pada tahun 2020, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, ACFE menemukan kasus penyalahgunaan aset dengan kerugian berkisar \$100.000 . Sebanyak 43% adalah kasus yang mendominasi tindak korupsi, sementara itu kecurangan laporan keuangan menduduki presentase 11% dan merugikan hingga \$954.000 dan termasuk kasus yang memiliki kerugian paling berdampak (Putri & Wilasittha, 2021)

Kasus penyelewengan praktik akuntansi telah banyak dibuktikan oleh publik, contoh perusahaan yang melakukan tindak kecurangan antara lain PT Garuda Indonesia, , PT Waskita Karya, PT Jiwasraya PT ASABRI, PT Angkasa Pura II, PT Jasindo, PT Kimia Farma. Survei oleh pihak berwajib antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melaporkan bahwa BUMN termasuk PT Garuda Indonesia terindikasi melakukan kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini membuat PT Garuda Indonesia diminta memperbaiki neracanya yang merugi \$2 Miliar pada 2018. Kasus lain terjadi pada perusahaan milik negara, PT.Waskita Karya Tbk. PT Waskita Karya juga menjadi sorotan publik hingga melibatkan direktur P.T Jasa Marga sebagai pihak yang andil dalam penyelesaian masalah berindikasi kecurangan. Pada tahun 2018, media ramai meliput perusahaan asuransi umum tertua dan terbesar di Indonesia, PT Asuransi

Jiwasraya, karena Jiwasraya tidak membayar klaim asuransi yang diperoleh sebesar Rp. 802 miliar pada bulan Oktober dan mencapai Rp. 12 miliar pada Desember 2019 (keuangan.kontan.co.id, 2020).

Variabel pertama adalah *financial stability*. *Financial stability* merupakan representasi dari stabilitas ekonomi dalam suatu perusahaan (Nurhikmah & Rahim, 2021). Stabilitas keuangan perusahaan dapat dinilai dari asetnya, dengan keyakinan bahwa sebagian besar aset perusahaan memberikan pengembalian yang maksimal kepada investor. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar risiko kecurangan terjadi. Berdasarkan penelitian (Lastanti et al., 2022), (Indonesia et al., 2022) dan (Larum, 2021) stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, berbeda dengan penelitian Fernando (2018), Riskiani (2020), Aprilia (2020)). 2021) yang berpengaruh negatif terhadap penipuan laporan keuangan.

Variabel kedua, perubahan direksi sering menjadi kepentingan pihak tertentu dalam politik yang menyebabkan konflik kepentingan (Wilantari & Ariyanto, 2023). Perubahan direksi menciptakan lingkungan yang tidak stabil dalam mengatur operasional perusahaan dan manajemen karena kemampuan mereka untuk membuat strategi dan mengambil kesempatan bertujuan untuk melakukan penipuan. Semakin sering terjadinya pergantian direksi di dalam sebuah perusahaan, semakin tinggi juga indeks penipuan laporan keuangan. Berdasarkan studi Marurung & Hardika (2015), Siddiq et al (2017) Wolfe & Hermanson (2017), Sasongko & Wijayantika (2019) mengatakan bahwa pergantian direktur berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Penelitian Septriani

& Handayani (2018), Achmad et al (2022), Segala & Siagiani (2021), mengungkapkan bahwa pergantian direktur berpengaruh negatif terhadap penipuan laporan keuangan.

Variabel ketiga adalah *e-procurement*. Penerapan *e-procurement* diperkirakan akan mengurangi kecurangan yang sering terjadi di sektor publik saat membeli produk dan layanan. E-procurement secara mendasar mengubah cara berpikir orang: dari proses manual yang terbuka untuk disalahgunakan menjadi sistem elektronik sistematis yang menghilangkan interaksi langsung, yang secara otomatis menurunkan penipuan.. Semakin efektif pengendalian internal yang didukung oleh pengadaan elektronik, semakin kecil kecenderungan transaksi curang. Berdasarkan kajian Nugroho (2015), M.Salim (2016) dan Akbar (2019), sistem pengadaan elektronik berpengaruh positif dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Sementara itu, penelitian Susian (2017) dan Romaissah (2019) menjelaskan bahwa penerapan sistem pengadaan elektronik berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Variabel keempat adalah *whistleblowing system*. *Whistleblowing system* “WBS” bertujuan untuk mencegah penipuan. Sistem ini dapat berperan sebagai pendorong bagi perusahaan untuk melindungi karyawan jika terjadi laporan kecurangan (Marciano et al., 2021). Semakin baik sistem pelaporan diterapkan dalam organisasi, semakin besar kejujuran dan transparansi untuk pencegahan kecurangan. Berdasarkan penelitian Gaurina dkk. (2017), Agusyani dkk. (2016), Jayanti & Suardana (2019), Islamiyah dkk. (2020), berpengaruh positif terhadap

kecurangan laporan keuangan. Sedangkan penelitian lain oleh Utami (2018) dan Asiah (2017) mempunyai pengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Variabel kelima adalah *government ownership*. Kepemilikan mayoritas memiliki kekuatan untuk mengarahkan manajemen, persentase kepemilikan yang lebih tinggi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan (Aviantara, 2019). Kepemilikan institusional berpengaruh baik terhadap perusahaan. Selain melakukan investasi yang signifikan, pemilik mayoritas juga mengendalikan operasi perusahaan. Semakin besar investasi dalam perusahaan, semakin baik kontrol pemegang saham untuk menghindari kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan penelitian Riandani & Rahmawati (2019), Helsa (2021), Sinulingga dkk. (2020) bahwa kepemilikan negara berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Berbeda dengan penelitian Suryandani (2021), Aviatara (2021) menjelaskan kepemilikan negara berpengaruh positif pada penipuan laporan keuangan.

Variabel keenam adalah yaitu *frequent number of CEO's picture*. Salah satu kepuasan seorang CEO adalah menunjukkan kepada setiap orang posisi atau jabatannya, sehingga mereka merasa superior dan tidak terikat oleh pedoman apapun (Bawekes et al., 2018; Crowe, 2011). Semakin sering foto CEO yang dicantumkan yang dalam laporan keuangan perusahaan, semakin tinggi kemungkinan CEO bertindak karena merasa memiliki kekuasaan dan hak istimewa dalam posisinya. Berdasarkan penelitian Sari & Nugroho (2020) dan Anda (2019), Dewi (2022) mengungkapkan bahwa *frequent number of CEO's picture* berpengaruh positif tpada penipuan laporan keuangan. Sementara itu, hasil riset

Isalati (2023), Mintara & Hapsari (2021) menjelaskan bahwa frekuensi foto CEO berpengaruh negatif pada penipuan laporan keuangan.

Mengacu pada *research gap* dan fakta diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi “**DETEKSI FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENTS DENGAN HEXAGON FRAUD THEORY (STUDI PADA BUMN 2017-2021 YANG TERDAFTAR DI BEI)**”

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Hexagon

Model Hexagon Fraud menjelaskan mengapa suatu bisnis atau pihak tertentu melakukan kecurangan. Teori *triangle fraud* dipaparkan oleh (Cressey, 1953) dengan menggunakan elemen tekanan, peluang dan rasionalisasi. Kemudian Wolfe & Hermanson (2004) menciptakan perspektif baru dengan menambahkan elemen keempat yaitu kompetensi dan disebut sebagai *diamond fraud*. Setelah itu, Crowe (2011) memperbarui teori ini dengan menambahkan elemen arogansi, yang menjadikannya sebagai *pentagon fraud*. Vousinas mengembangkan dan memperkenalkan teori hexagon fraud (2019), yang merupakan teori deteksi penipuan paling baru dan rumit. Teori ini menambahkan elemen kolusi, yang merupakan elemen keenam. Lebih sulit untuk menghentikan kolusi ketika sudah terjadi, terutama jika terjadi antar karyawan atau antara karyawan dan pihak eksternal (Vousinas 2019).

Hubungan teori hexagon (*Hexagon Theory*) dengan variabel yang diteliti adalah *financial stability (stimulus)* dengan penjelasan bahwa tingginya dorongan (tekanan) perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan terbaik guna menambah

daya tarik investor, akan mempengaruhi kecurangan laporan keuangan, selanjutnya untuk *director change (capability)* semakin besar rasio ini maka terindikasi banyak celah untuk mempraktekan kemampuan direksi mengelola entitas ntuk melakukan kecurangan laporan keuangan, kemudian untuk *e-procurement (collusion)* semakin tinggi kolusi yang beredar di lingkungan perusahaan semakin besar implementasi pengendalian internal untuk mencegah kecurangan laporan keuangan, berikutnya *whistleblowing system (opportunity)* semakin besar peluang dalam melaporkan tindak kecurangan maka semakin tinggi integritas individu dalam mencegah kecurangan laporan keuangan, selanjutnya *government ownership (rasionalization)* semakin besar presentase saham pemerintah, maka semakin ketat pengendalian pemegang saham untuk memaksimalkan laba yang diperoleh dengan menghindari kecurangan laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu jumlah gambar CEO, semakin banyak jumlah gambar yang beredar, maka semakin besar ego CEO untuk memnfaatkan kekuasaannya untuk melakukan penipuan laporan keuangan.

2.2 Fraud

Fraud diartikan sebagai tindak manipulasi atau kesalahan yang sengaja dilakukan oleh orang-orang demi kepentingan pribadi yang menyadari bahwa penipuan tersebut dapat berdampak negatif pada orang atau perusahaan lain (Ernst & Young LLP, 2009). *Fraud* adalah penipuan yang digunakan untuk menguntungkan pelakunya dengan mengorbankan orang lain. Kesalahan yang tidak disengaja tidak sama dengan penipuan. Kategori *fraud* tidak termasuk kesalahan yang dilakukan individu saat memasukkan data atau kejadian (Githa, 2016)

2.3 *Financial Stability*

Financial stability merupakan penilaian kinerja suatu perusahaan untuk memastikan keadaan ekonomi tetap stabil (Nurhikmah & Rahim, 2021) Stabilitasnya kondisi pada laporan keuangan akan lebih menarik dimata investor maupun publik. Apabila terjadi masalah pada kestabilan financial maka pihak manajemen akan berusaha untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi keuangan agar selalu terlihat apik. Hal tersebut memicu tekanan pada manajemen untuk melakukan tindak kecurangan laporan keuangan. (Jao et all, 2020)

2.4 *Director Change*

Director Change termasuk aspek yang berpotensi mengakibatkan penipuan laporan keuangan (Mintara & Hapsari, 2021) Setiap pergantian direksi acapkali dikaitkan dengan politik dan kepentingan beberapa pihak yang memicu terjadinya konflik kepentingan (Rahardjo & Sihombing, 2014). Hal itu mengakibatkan ketidakstabilan komando dan kontrol terhadap operasional perusahaan, manajemen yang mempunyai potensi untuk merancang strategi dan menentukan waktu tepat untuk melakukan kecurangan dengan memanfaatkan ketidakstabilan yang sedang terjadi di dalam perusahaan untuk mencari keuntungan

2.5 *E-procurement*

Pengadaan secara digital adalah pengadaan barang/jasa melalui transaksi digital dan teknologi informasi yang berlandaskan aspek hukum (Peraturan Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 4, 2012) Semakin baik e-procurement diimplementasikan dalam proses pengadaan, semakin baik upaya melawan

kecurangan dapat diperkuat. Hal ini dapat mengurangi motivasi untuk berperilaku menyimpang (Nugroho, 2015), (Salim, 2016) dan (Akbar, 2019)

2.6 Whistleblowing System

Whistleblowing system merupakan alat yang dapat mendeteksi tanda-tanda kecurangan dengan memperhatikan prosedur yang ada dan bukan masalah pribadi dari kebijakan tertentu ataupun berdasarkan fitnah (Pamungkas dkk, 2017). Penerapan sistem pelaporan disesuaikan dengan aturan masing-masing perusahaan. Dalam hal ini diharapkan sistem ini akan memberikan manfaat untuk meningkatkan tata kelola perusahaan (Shawver & Shawver, 2018). Penyebab terjadinya fraud adalah faktor peluang, *whistleblowing system* adalah alat yang paling memungkinkan untuk mendukung upaya deteksi *fraud* karena terdapat peluang untuk melaporkan tindak kecurangan tanpa mengetahui siapa yang melapor. (Suryandari & Valentin, 2021).

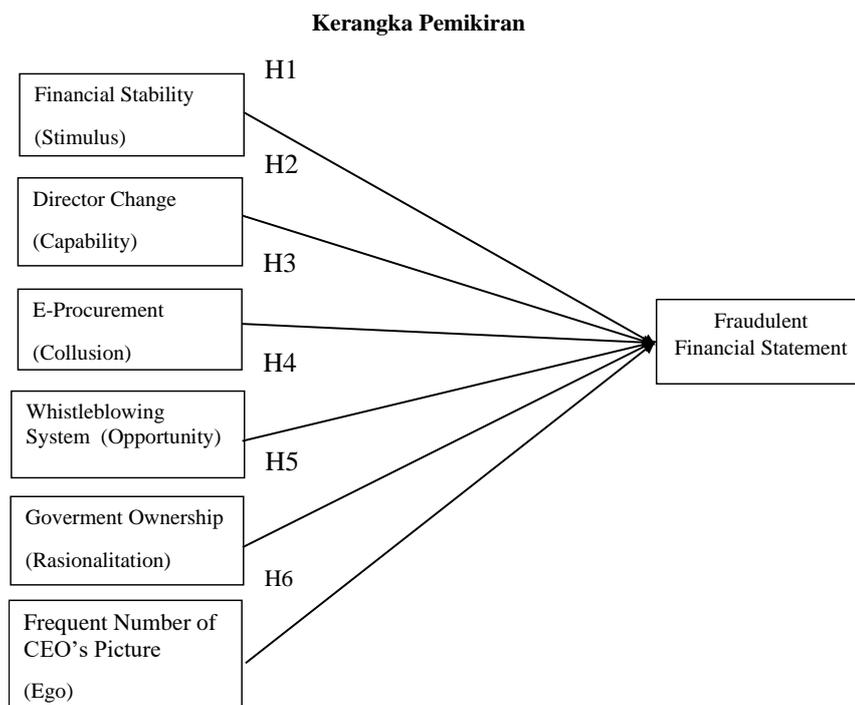
2.7 Government Ownership

Kepemilikan institusional adalah total saham yang dimiliki suatu entitas (Dewi, 2005). Investor institusional sangat efektif digunakan untuk memantau pergerakan saham dalam pengambilan keputusan perusahaan yang baik untuk seorang manajer. Pengukuran jumlah saham dapat diukur dengan presentase entitas minimal 20% dari total saham perusahaan Sutrisna et al. (2019). Besarnya kepemilikan saham yang dimiliki pemerintah mengakibatkan entitas merasa telah berbuat lebih pada perusahaan. Dengan melakukan penipuan, pelaku membenarkan perbuatannya atau meyakini bahwa dirinya benar, sehingga terpaksa mengambil keuntungan, meyakini bahwa itu sah-sah saja selama melakukan hal yang benar.

2.8 *Frequent Number of CEO's Picture*

Jumlah citra CEO yang terus-menerus ditampilkan adalah perantara yang digunakan untuk mengukur tingkat keangkuhan terhadap penipuan laporan anggaran. Dalam ulasan ini, keangkuhan diwakili oleh foto CEO yang ditampilkan dalam *annual report* sebuah organisasi. (Nurangraini dan Yusuf, 2020) Semakin banyak foto CEO dalam *annual report* entitas, semakin dianggap membuat seorang CEO merasa memiliki wewenang yang besar. Mereka merasa bahwa dengan kedudukan mereka yang tinggi, pedoman dan disiplin dalam organisasi tidak memiliki pengaruh yang berarti bagi mereka, mengingat telah melakukan kesalahan representasi. Seperti itu, ketika organisasi mengalami penurunan dalam eksekusi moneter, CEO dapat melakukan keuntungan dewan secara terbuka dengan alasan bahwa dia percaya dia memiliki hak istimewa untuk melakukannya

2.9 Kerangka Pemikiran



2.10 Hipotesis

H1 = *Financial Stability* berpengaruh terhadap *Fraud Financial Statement*

H2 = *Director Change* berpengaruh terhadap *Fraud Financial Statement*.

H3 = *E-procurement* berpengaruh terhadap *Fraud Financial Statement*.

H4 = *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap *Fraud Financial Statement*.

H5 = *Government Ownership* berpengaruh negatif terhadap *Fraud Financial Statement*

H5 : Gambar CEO berpengaruh positif terhadap *Fraud Financial Statement*

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan tipe pendekatan causal comparatif atau hubungan sebab akibat. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 yang dapat diakses melalui www.idx.co.id dan melalui website resmi perusahaan terkait kemudian diolah menggunakan SPSS 26.

3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi variabel lain atau variabel yang diteliti . Penipuan laporan keuangan menjadi variabel dependen dalam riset ini. Analisis variabel tersebut menggunakan metode *f-score* yang dikemukakan oleh Dechow dkk. (2012) guna mendeteksi terjadinya penipuan laporan keuangan .

3.2 Variabel Independen

3.2.1 *Financial Stability (Stimulus) (X1)*

Stabilitas keuangan adalah keadaan yang menunjukkan bahwa situasi keuangan bisnis atau organisasi sehat. Dalam penelitian ini, rasio perubahan total aset (*ACHANGE*) yang ditentukan dengan menggunakan rumus:

$$ACHANGE = \frac{(\text{Total Aset } t - \text{Total Aset } t - 1)}{\text{Total Aset } t - 1}$$

3.2.2 *Director Change (Capability) (X2)*

Director change adalah jumlah pergantian direksi di suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini, *Director Change* diproksikan dengan rasio jumlah pergantian direksi (*BDOC*), yang dihitung dengan rumus:

$$Director\ change = \text{Jumlah pergantian direksi}$$

3.2.3 *E-Procurement (Collusion) (X3)*

E-procurement merupakan sistem pengendalian internal untuk penetingan pengadaan barang dan jasa secara terbuka dengan tujuan mencegah tindak kecurangan. Dalam penelitian ini, *E-procurement* (*EPRO*) dihitung dengan rumus:
Dummy : 1 jika perusahaan menerapkan e-procurement, 0 jika sebaliknya

3.2.4 *Whistleblowing System (Opportunity) (X4)*

WBS adalah mekanisme untuk melaporkan dugaan kejahatan yang telah atau akan terjadi, dalam hal ini melibatkan karyawan dan orang lain yang dilakukan oleh organisasi tempat mereka bekerja dan pelapor tidak termasuk dalam pelaku kejahatan yang dilaporkan. . Dalam penelitian ini *whistleblowing System* (*WBS*) dihitung dengan rumus:

Dummy : 1 jika perusahaan menerapkan *whistleblowing system*, 0 jika sebaliknya

3.2.5 *Government Ownership (Rasionalization)* (X5)

Government Ownership adalah total kepemilikan saham pemerintah di suatu entitas yang dapat diukur melalui presentase jumlah lembar saham entitas yang dimiliki oleh negara. Dalam penelitian ini *Government Ownership* diproksikan dengan presentase kepemilikan saham (GOVSHIP), yang dihitung dengan rumus :

$$\text{Government Ownership} = \text{Presentase kepemilikan saham}$$

3.2.6 Jumlah foto CEO (*Ego*) (X6)

Jumlah foto CEO yang tersebar pada laporan tahunan perusahaan. Akibat dari tindakan tersebut dapat menimbulkan sikap arogan pada. Jumlah foto CEO dapat dirumuskan dengan:

Dummy : 1 Jika CEO adalah Phd/Doctor, 0 jika lainnya

3.3 **Populasi dan Sample**

Populasi adalah seluruh peristiwa, individu, kelompok atau apapun yang mempunyai karakter khusus yang diperlukan sebagai bahan analisis agar dapat disimpulkan (Ghozali, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN tahun pengamatan 2017-2021 yang didapatkan melalui www.idx.com

Sampel merupakan bagian kecil dari populasi yang jumlahnya paling sedikit 30 untuk keperluan riset (Sugiyono, 2017). Teknik sampling yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah teknik *Non probability sampling* dan diperkuat menggunakan *purposive sampling*. Definisi dari *Purposive Sampling* adalah

pengumpulan data sampel dengan syarat khusus (Sugiyono, 2017). Beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Perusahaan sektor BUMN tahun 2017-2021 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Perusahaan yang mempunyai data laporan keuangan tahunan yang dibutuhkan untuk pengukuran variabel.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh dari media secara tidak langsung dengan menawarkan informasi yang terpercaya. Data sekunder yang dibutuhkan dapat dilihat di situs resmi BEI berupa laporan keuangan tahunan BUMN tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pendekatan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data untuk investigasi ini. Peneliti membutuhkan laporan keuangan BUMN tahun 2017–2021 yang dapat dilihat pada website BEI www.idx.co.id dan website resmi perusahaan.

3.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan teknik analisis data kuantitatif. Setelah

memperoleh data yang diinginkan, peneliti selanjutnya melakukan pengolahan

data dan analisis melalui alat bantu berikut :

1. Analisis Statistik Deskriptif, analisis ini berguna untuk menjabarkan data kuantitatif sebelum dianalisis lanjut dengan analisis regresi linier berganda.

2. Uji Asumsi Klasik yaitu meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedestisitas, dan uji autokorelasi.

3. Analisis regresi linier berganda, analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

4. Uji Hipotesis yaitu meliputi uji koefisien determinasi, uji statistik F, dan uji statistik t)

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Financial Stability	-0.76	2.28	0.1244	0.32273
Director Change	0.00	1.00	0.4952	0.50238
E-procurement	1.00	1.00	1,0000	0.00000
Whistleblowing System	1.00	1.00	1,0000	0.00000
Government Ownership	0.00	0.99	0.4108	0.26131
Frequent Number of CEO's Picture	1.00	7.00	2.9238	1.16599
Fraudulent Financial Statements	-261.00	2291.00	371.4667	456.71244

Sumber : Data diolah SPSS, 2023

4.1.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.2

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Beta	Sig
Financial Stability	-0.058	0.023
Director Change	-0.138	0.027
E-Procurement	0.088	0.035
Whistleblowing System	-0.026	0.819
Government Ownership	0.222	0.005
Frequent Number of CEO's Picture	0.122	0.025

Sumber : olah data SPSS 26 2023

Pada tabel 4.2 menunjukkan hasil analisis statistik yang dilakukan untuk model penelitian regresi linier berganda dan diperoleh persamaan berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

4.1.3 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.3

Hasil Uji Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
,217 ^a	0,084	,009	193,36938

Sumber : Data diolah SPSS, 2023

Nilai R Square sebesar 0,084, hal ini berarti bahwa pengaruh variabel *financial stability*, *director change*, *e-procurement*, *whistleblowing system*, *government ownership*, dan *CEO picture* secara simultan terhadap penipuan laporan keuangan sebesar 84% sedangkan sisanya sebesar 16% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti

4.1.4 Uji Statistik F

Tabel 4.4

Hasil Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	185901,596	46475,399	1,243	,000 ^b
	Residual	3737774,366	37377,744		
	Total	3923675,962			

Sumber : Data diolah SPSS, 2023

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan nilai bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari α dari (0,05) dengan nilai F hitung = 1,243 sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini telah fit atau telah baik sehingga memenuhi uji goodness of fit. Oleh karena itu dapat dilanjutkan ke pengujian berikutnya

4.1.5 Uji Statistik T

Dari hasil tabel 4.9 diatas, maka pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut :

1. Diketahui nilai sig pada variabel *financial stability* adalah $0.023 < 0,005$, kesimpulan dari data tersebut adalah H1 diterima yang berarti stabilitas keuangan berpengaruh secara parsial terhadap penipuan laporan keuangan.
2. Diketahui nilai sig pada variabel *director change* adalah $0.027 < 0,005$, kesimpulan dari data tersebut adalah H2 diterima yang berarti *director change* berpengaruh secara parsial terhadap kecurangan laporan keuangan.

3. Diketahui nilai sig pada variabel *E-procurement* adalah $0.035 < 0,005$, kesimpulan dari data tersebut adalah H3 diterima yang berarti *eprocurement* berpengaruh secara parsial terhadap kecurangan laporan keuangan.
4. Diketahui nilai sig pada variabel *whistleblowing system* adalah $0.819 > 0,005$ kesimpulan dari data tersebut adalah H4 ditolak yang berarti *whistleblowing system* tidak berpengaruh secara parsial terhadap penipuan laporan keuangan.
5. Diketahui nilai sig pada variabel *government ownership* adalah $0.005 < 0,005$ kesimpulan dari data tersebut adalah H5 ditolak yang berarti *government ownership* tidak berpengaruh secara parsial terhadap penipuan laporan keuangan.

Diketahui nilai sig pada variabel *frequent number of CEO's picture* adalah $0.025 < 0,005$ kesimpulan dari data tersebut adalah H6 diterima yang berarti *frequent number of CEO's picture* berpengaruh secara parsial terhadap penipuan laporan keuangan

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh *financial stability* terhadap *fraudulent financial statements*

Interpretasi 4.9 untuk variabel stabilitas keuangan memperoleh nilai sig $0,023 < 0,005$ dan nilai koefisien $-0,058$ sehingga kesimpulannya adalah H1 diterima yang berarti stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan dan mengonfirmasi teori hexagon bahwa *financial stability* menjadi faktor yang diprediksi mampu untuk mendeteksi

penipuan laporan keuangan pada perusahaan BUMN tahun pengamatan.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Wijaya (2019) yang mengklaim bahwa kecurangan laporan keuangan terjadi ketika bisnis memanipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan atau mempertahankan reputasi mereka ketika pertumbuhan di bawah rata-rata yang berakibat terciptanya kemungkinan situasi keuangan bisnis memburuk di masa depan. Keadaan seperti ini menyulitkan bisnis untuk mengumpulkan uang dari investor dalam rangka mengakhiri masalah keuangannya serta dapat menghambat perkembangan bisnis.

Semakin baik atau baik kondisi keuangan perusahaan dapat mencegah berkurangnya kecurangan akuntansi, sebaliknya ketika kestidaksatbilan keuangan tinggi maka tingkat kecurangan laporan keuangan dapat meningkat (Riskiani 2020). Diasumsikan bahwa pengguna laporan keuangan dan perusahaan mampu mengelola bisnis perusahaan secara adil. Elemen tekanan dari teori hexagon diproksikan dengan stabilitas keuangan, yang dinilai dari perubahan aset perusahaan. Perusahaan dengan total aset besar atau kecil tetapi arus kas besar cenderung melakukan manipulasi untuk menunjukkan stabilitas perusahaan yang baik (Arianto & Wilantari, 2020)

4.2.2 Pengaruh *director change* terhadap *fraudulent financial statements*

Interpretasi tabel 4.9 untuk variabel *director change* memperoleh nilai sig $0,027 < 0,05$ dan nilai koefisien $-0,138$ sehingga kesimpulannya adalah H2 diterima yang berarti *director change* berpengaruh positif pada kecurangan laporan keuangan dan mengonfirmasi teori hexagon bahwa *director change*

menjadi faktor yang diprediksi mampu untuk mendeteksi penipuan laporan keuangan pada perusahaan BUMN tahun pengamatan.

Studi ini didukung oleh Sasongko dan Wijyantika (2019), yang menemukan bahwa pergantian direktur yang sering menciptakan kekosongan kekuasaan jangka pendek dan memaksa perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan undang-undang baru, yang menjadikannya tempat ideal untuk melakukan penipuan. Pelaku akan mencari cara untuk menggunakan kemampuannya dalam memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia. Stabilitas operasional sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh keterampilan manajemen direktur yang dengan kemampuan tersebut pelaku dapat dengan cepat menyusun strategi penipuan yang merugikan lingkungan.

Kemampuan adalah komponen tambahan dari penelitian Wolfe dan Hermanson (Safta, 2021), dengan tujuan membuat kecurangan lebih sulit dideteksi dan dihindari. Mereka mengira bahwa mereka yang melakukan penipuan mampu menyusun rencana untuk menyembunyikan kejahatan mereka dan mendapatkan imbalan finansial yang diinginkan.

4.2.3 Pengaruh *e-procurement* terhadap *fraudulent financial statements*

Interpretasi tabel 4.9 untuk variabel *e-procurement* memperoleh nilai sig $0,035 < 0,05$ dan koefisien regresi 0,088 sehingga kesimpulannya adalah H3 diterima yang berarti *e-procurement* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan dan mengonfirmasi teori hexagon bahwa *e-procurement* menjadi faktor yang diprediksi mampu untuk mendeteksi penipuan laporan keuangan pada perusahaan BUMN tahun pengamatan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Utami (2020) yang menjelaskan bahwa kecurangan laporan keuangan dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya kualitas pengadaan, serta adanya niat *fraud* dari pelaksanaan pengadaan. Adapun aktor peluang melakukan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa dapat menjadi pertimbangan dalam mendesain struktur pengendalian internal yang efektif dengan tujuan mencegah kecurangan laporan keuangan.

E-procurement mengalihkan fokus dari manual dan rentan penyalahgunaan menjadi sistem elektronik terorganisir yang meminimalkan interaksi langsung, sehingga meminimalkan penipuan. Insiden laporan keuangan palsu dapat dikurangi dengan efektivitas pengendalian internal perusahaan (Zulaikha, 2016)

4.2.4 Pengaruh *whistleblowing system* terhadap *fraudulent financial statements*

Diketahui hasil regresi 4.9 untuk variabel *whistleblowing system* memperoleh nilai sig $0,819 > 0,05$ dan nilai koefisien $-0,026$ sehingga kesimpulannya adalah H4 ditolak yang berarti *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap penipuan laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak dapat mengonfirmasi teori hexagon yang berarti *whistleblowing system* bukan menjadi faktor yang relevan untuk mendeteksi *fraudulent financial statements* pada perusahaan BUMN tahun pengamatan.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Asiah (2017) yang menunjukkan bahwa laporan keuangan yang menyesatkan berdampak negatif terhadap sistem whistleblower. Whistleblowing menurut Suyatno (2021)

adalah upaya untuk menemukan atau mengungkapkan kesalahan, penipuan, atau kegiatan yang melanggar hukum yang terjadi dalam suatu organisasi (Nugroho, 2015). Ketika integritas karyawan dan kepentingan publik bertentangan, whistleblowing dapat digunakan (Wardana dkk, 2017). Whistleblower adalah seseorang yang memberi tahu pihak berwenang tentang kesalahan dan penipuan di tempat kerja (Nugroho, 2015). Sistem pelaporan berfungsi sebagai mekanisme kontrol organisasi selain sebagai alat pelaporan (Jayanti & Suardana, 2019). Metode pelaporan dapat dikatakan efektif karena empat hal: anonimitas, independensi, aksesibilitas, dan pengawasan. (Albrecht et al., 2012).

Metode pelaporan yang jelas dan akuntabel, perlindungan data pribadi pelapor, serta prosedur evaluasi dan perbaikan sistem menjadi komitmen whistleblowing system untuk menghindari kecurangan (Wardana dkk, 2017, Wahyuni & Nova, 2018). Menurut studi tertentu, mekanisme pelaporan memiliki dampak yang kecil dalam pencegahan penipuan (Sujana dkk, 2020). Hal ini diduga karena implementasi whistleblowing system yang tidak tepat, yang membuat whistleblower berisiko ketika mengungkapkan penipuan atau korupsi, serta kekhawatiran yang meluas tentang penerapan peraturan terkait whistleblower. (Sujana dkk, 2020)

Berdasarkan data WBS dalam *website* resmi www.bumn.go.id pada tahun penelitian menjelaskan bahwa kasus penipuan laporan keuangan di sektor BUMN menurun sehingga dalam riset ini WBS bukan menjadi faktor yang relevan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Pencegahan

penipuan adalah tindakan penting yang ditujukan untuk mencegah penipuan di semua area organisasi (pencegahan), mengecilkan potensi pelaku atau tindakan coba-coba (kepatuhan) dan mempersulit pelaku penipuan untuk bergerak, serta memberikan sanksi yang sesuai atas tindakan/penipuan yang dilakukan oleh pelaku (penegakan hukum perdata) (Nugroho, 2015).

4.2.5 Pengaruh *government ownership* terhadap *fraudulent financial statements*

Interpretasi tabel 4.9 mengartikan *government ownership* memperoleh nilai sig $0,005 < 0,05$ dan nilai koefisien 0,222 sehingga kesimpulannya H5 ditolak yang berarti *government ownership* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan dan tidak berhasil mengonfirmasi teori hexagon. Variabel *government ownership* kurang relevan untuk mendeteksi penipuan laporan keuangan pada perusahaan BUMN tahun pengamatan.

Hasil yang didapatkan dalam riset ini linier dengan penelitian Aviantara (2021) yang berpendapat bahwa kepemilikan pemerintah memberikan dampak yang menguntungkan terhadap kecurangan laporan keuangan karena kepemilikan mayoritas memiliki kewenangan untuk mengarahkan manajemen, dan persentase saham yang lebih tinggi dapat mempengaruhi penyusunan laporan keuangan dengan mengizinkan akrual diskresioner dari pihak pengendali untuk lebih mengutamakan standar yang telah ditetapkan.

Berbeda dengan Sinulingga (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham pemerintah memberikan dukungan penuh untuk perusahaan dengan menanamkan investasi dan turut mengawasi operasional

perusahaan. Besarnya kepemilikan saham di sebuah perusahaan sejalan dengan tingginya pengawasan oleh pemegang saham agar terhindar dari kecurangan laporan keuangan. Kepemilikan saham pemerintah dapat memonitor manajemen dalam pengawasan tata kelola perusahaan dan meningkatnya kontrol terhadap keberlangsungan perusahaan yang lebih maksimal. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan dalam memaksimalkan laba yang diperoleh (Riandani & Rahmawati 2021)

4.2.6 Pengaruh *frequent number of CEO's picture* terhadap *fraudulent financial statements*

Intepretasi dari tabel 4.9 mengartikan bahwa jumlah foto CEO memperoleh sig $0,025 < 0,05$ dan nilai koefisien sejumlah 0,122 sehingga kesimpulannya adalah H6 diterima yang berarti Jumlah foto CEO berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan dan mengonfirmasi teori hexagon. Variabel jumlah foto CEO dapat menjadi faktor yang diprediksi mampu mendeteksi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN tahun pengamatan.

Hasil yang didapatkan dalam riset ini konsisten dengan penelitian Amida (2019), yang menunjukkan bahwa seringnya penggunaan gambar CEO berpengaruh positif pada penipuan laporan keuangan karena menunjukkan otoritas CEO dan anggapan bahwa kebijakan apa pun tidak dapat ditegakkan dalam posisinya. Sebaran gambar CEO yang diperlihatkan dalam *annual report* berfungsi sebagai simbol kebanggaan. 2020 (Nurangraini dan Yusuf, 2020). Kedudukan

yang tinggi mengakibatkan bahwa pembatasan berdampak kecil atau tidak sama sekali pada mereka

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Menurut uji data yang telah dilakukan dengan sampel 22 pada perusahaan sektor BUMN tahun 2017-2021 yang terdaftar di BEI, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Stabilitas keuangan memiliki pengaruh pada kecurangan laporan keuangan karena laporan keuangan palsu akan berkurang seiring dengan membaiknya posisi keuangan perusahaan, sebaliknya jika kondisi perusahaan tidak stabil justru akan meningkatkan kasus penipuan laporan keuangan.
2. Pergantian direktur mempengaruhi kecurangan laporan keuangan karena mereka yang melakukan kecurangan akan mengambil kesempatan dengan menggunakan kemampuan dan bakat mereka, maka dari itu tingginya rasio pergantian direksi mengakibatkan kemungkinan terjadi *fraud* pada laporan keuangan.
3. *E-procurement* berpengaruh pada kecurangan laporan keuangan karena membantu kontrol internal menjadi lebih efektif dan mengurangi terjadinya kasus penipuan laporan keuangan.
4. *Whistleblowing system* tidak berpengaruh pada penipuan laporan keuangan karena adopsi sistem whistleblower akan meningkatkan

integritas dan transparansi organisasi, yang akan membantu mencegah penipuan, sehingga tidak berdampak pada penipuan laporan keuangan.

5. *Government ownership* berpengaruh pada laporan keuangan palsu karena pemegang saham lebih cenderung memantau perusahaan dengan persentase kepemilikan pemerintah yang lebih besar untuk mencegah laporan keuangan palsu.
6. Jumlah gambar CEO berpengaruh pada penipuan laporan keuangan karena CEO cenderung bertindak salah yang percaya bahwa posisinya memberinya hak dan keistimewaan khusus.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam riset ini dan berguna untuk menjadi bahan pertimbangan pada riset selanjutnya antara lain:

1. Banyaknya sebaran data pada penelitian ini mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengujian asumsi klasik
2. Peneliti hanya menggunakan Perusahaan BUMN non keuangan yang berarti hasil dari penelitian ini tidak general untuk seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI.
3. Masih adanya hipotesis yang ditolak sehingga masih ada kemungkinan variabel baru yang lebih relevan yang dapat digunakan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan

5.3 Saran

Merujuk pada kesimpulan dan keterbatasan penelitian, perlu dikemukakan bahwa penelitian berikutnya diharapkan menggunakan proksi tambahan untuk variabel independen, serta memperluas penelitian dengan memasukkan sampel perusahaan yang

tidak hanya tercatat di Bursa Efek Indonesia, atau mengubah sektor perusahaan yang diteliti, agar penelitian dapat diterapkan secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, N. R., Zakaria, A., & Prihatni, R. (2022). Financial Statement Analysis of Fraud with Hexagon Theory Fraud Approach. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Auditing*, 3(1), 137–161.
<http://pub.unj.ac.id/journal/index.php/japa>DOI:<http://doi.org/XX.XXXX/JurnalAkuntansi,Perpajakan,danAuditing/XX.X.XX><https://doi.org/xx.xxxxx/JAPA/xxxxx>.
- Akuntansi, J., & Keuangan, D. A. N. (2020). *No Title*. 4(1), 14–31.
- Alfarago, D., & Mabrur, A. (2022). Do Fraud Hexagon Components Promote Fraud in Indonesia? *Etikonomi*, 21(2), 399–410.
<https://doi.org/10.15408/etk.v21i2.24653>
- Aviantara, R. (2021). *Asia Pacific Fraud Journal*. 6, 26–42.
<https://doi.org/10.21532/apfjournal.v6i1.192>
- Basri, Y. M. (2020). *Analisis Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Fraud Hexagon*. 3(1), 50–73.
- Budiarti, L., & Rahayu, A. P. (2019). *ASIMETRI INFORMASI , FAKTOR INDIVIDUAL DAN FRAUD PENGADAAN BARANG / JASA*. 0832, 1–18.
- Cipta, A. T., & Nurbaiti, A. (2022). Fraud Hexagon untuk Mendeteksi Indikasi Financial Statement Fraud. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(10), 2977.
<https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i10.p06>
- Citra, A., Lindrianasari, ., Syaipudin, U., Dharma, F., & Metalia, M. (2022).

- Fraud Detection of Financial Statements through the Fraud Hexagon Approach in Indonesian SOEs. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 22(22), 45–58. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2022/v22i2230709>
- Indonesia, S. E., Achmad, T., Ghozali, I., & Pamungkas, I. D. (2022). *Hexagon Fraud : Detection of Fraudulent Financial Reporting in*. 1–16.
- Influence Profesional Judgement, Experience, Expertise, Knowledge Accounting And Auditing and Auditor Profesionalism to the accuracy of audit opinion By Public Accounting*. (2015). 2(2).
- Kristen, U., Issn, M., & Sagala, S. G. (2021). *Pengaruh Fraud Hexagon Model Terhadap Fraudulent Laporan Keuangan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019*. 13(November), 245–259.
- Larum, K., Zuhroh, D., & Subiyantoro, E. (2021). *Fraudlent Financial Reporting : Menguji Potensi Kecurangan Pelaporan Keuangan dengan Menggunakan Teori Fraud Hexagon*. 4(1), 82–94.
- Lastanti, H. S., Murwaningsari, E., & Umar, H. (2022). the Effect of Hexagon Fraud on Fraud Financial Statements With Governance and Culture As Moderating Variables. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22(1), 143–156. <https://doi.org/10.25105/mraai.v22i1.13533>
- Marciano, B., Syam, A., Suyanto, & Ahmar, N. (2021). Whistleblowing System dan Pencegahan Fraud: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(3), 313–324.

- Mintara, M. B. M., & Hapsari, A. N. S. (2021). Pendeteksian Kecurangan Pelaporan Keuangan Melalui Fraud Pentagon Framework. *Perspektif Akuntansi*, 4(1), 35–58. <https://doi.org/10.24246/persi.v4i1.p35-58>
- Nadziliyah, H., & Primasari, N. S. (2022). Analisis Fraud Hexagon Terhadap Financial Statement Fraud Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi. *Accounting and Finance Studies*, 2(1), 21–39. <https://doi.org/10.47153/afs21.2702022>
- Nugroho, D. S., & Diyanty, V. (2022). *Fraud Hexagon and Fraudulent Financial Statement : Comparison Between OMI and Beneish Model*. 207(Icemac 2021), 1–10.
- Nurdiatama, D., & Hariani, S. (2020). *Akurasi 103*. 2(3), 103–116.
- Nurhikmah, S., & Rahim, R. (2021). Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan terhadap Financial Sustainability Ratio Perbankan. *Journal of Management and Business Review*, 18(1), 25–47. <https://doi.org/10.34149/jmbr.v18i1.214>
- Octaviana, N. (2022). Analisis Elemen-Elemen Fraud Hexagon Theory Sebagai Determinan Fraudulent Financial Reporting. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 106–121. <https://doi.org/10.46806/ja.v11i2.895>
- Oktavia, S., Bahari, A., & Kartika, R. (2022). Pengaruh Elemen Fraud Hexagon Theory Terhadap Fraud Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 12(2), 275–284. <https://doi.org/10.37859/jae.v12i2.4207>

- Putri, S. Y., & Wilasittha, A. A. (2021). *PERKEMBANGAN FRAUD THEORY DAN RELEVANSI*. 1(2), 726–735.
- Ridwan, M., Suraida, I., & Septiawan, B. (2021). *SKEPTISISME AUDITOR DAN DIMENSI FRAUD TRIANGLE*. 4(1), 61–72.
<https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i1.78>
- Riyanti, A., & Trisanti, T. (2021). *International Journal of Social Science And Human Research The Effect of Hexagon Fraud on the Potential Fraud Financial Statements with the Audit Committee as a Moderating Variable*. 04(10), 2924–2933. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i10-36>
- Siregar, A., & Murwaningsari, E. (2022). Pengaruh Dimensi Fraud Hexagon Terhadap Financial Statement Fraud. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 6(2), 2579–9975. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka>
- Suryandari, E., & Valentin, L. (2021). *Determinan Fraud Dana Desa : Pengujian Elemen Fraud Hexagon , Machiavellian , dan Love of Money*. 5(1), 55–78.
<https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11688>
- Wilantari, N. M., & Ariyanto, D. (2023). Determinan Fraud Hexagon Theory dan Indikasi Financial Statement Fraud. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(1), 87.
<https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i01.p07>